

“REVOLUSI DALAM REVOLUSI”: TENTARA, LASKAR, DAN JAGO DI WILAYAH KARAWANG 1945-1947

“REVOLUTIONS IN REVOLUTIONS”, SOLDIER, LASKAR (PARAMILITARY TROOPS), AND JAGO (WARRIOR) IN KARAWANG AREA IN 1945-1947

Iim Imadudin

Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat
Jln. Cinambo No.136 Ujungberung-Bandung 42094
e-mail: imadudin1975@gmail.com

Naskah Diterima: 12 Januari 2018

Naskah Direvisi: 18 Februari 2018

Naskah Disetujui: 3 Maret 2018

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkap konflik tentara dengan laskar dan jago di wilayah Karawang. Penelitian ini mempergunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sama seperti halnya di daerah lain, revolusi kemerdekaan di wilayah Karawang berlangsung dengan sengit. Dinamika perjuangan kemerdekaan di Karawang terasa lebih keras lagi setelah proklamasi kemerdekaan. Pada masa perjuangan Karawang merupakan “rumah” bagi tentara dan laskar perjuangan. Banyaknya kelompok laskar dan kelompok jago yang sering menghadirkan kerusuhan menimbulkan permasalahan tersendiri sebagaimana digambarkan pada artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antara tentara, laskar, dan jago terjadi disebabkan adanya keyakinan yang besar terhadap janji-janji revolusi, perbedaan ideologis mengenai bagaimana perjuangan harus dimenangkan, faktor ketidakpercayaan yang mengakibatkan hubungan-hubungan yang tidak harmonis antar-faksi perjuangan di Karawang.

Kata kunci: revolusi, kemerdekaan, konflik, Karawang.

Abstract

This study aims to reveal the conflict of soldiers with paramilitary troops and warrior in the area of Karawang. This study uses historical methods consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Just as in other areas, the revolution of independence in the Karawang was fierce. The dynamics of the struggle for independence in Karawang was even harder after the proclamation of independence. Karawang is a “home” for the army and the paramilitary-troops struggle. The large number of paramilitary troops groups and groups of warrior often caused riots that raise their own problems as illustrated in this article. The results show that the conflict between the army, the paramilitary troops and the warrior occurred due to the great conviction of the promises of the revolution, the ideological differences about how the struggle should be won. The unbelieving factor resulted an unharmonious relationships between-fraction struggle in Karawang.

Keywords: revolution, independence, conflict, Karawang

A. PENDAHULUAN

Revolusi nasional merupakan *rite de passage* (ritus peralihan). Revolusi secara formal telah dimenangkan dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, ada pihak-pihak

yang tidak mampu melepaskan diri dari cengkraman revolusi mengalami kekecewaan. Realitas sosial dan politik yang dihadapinya semakin jauh meninggalkan kesadarannya (Majid dan Darmiati, 1999: xiv).

Realitas sosial dan politik yang terjadi menimbulkan ketidakpuasan umum. Namun yang paling penting adalah kekecewaan terhadap janji-janji kemerdekaan bahwa nasib rakyat akan berubah secepatnya (Kahin, 1979: 101).

Kekecewaan tersebut berkembang menjadi radikalisme yang cenderung mengarah anarki. Sementara, pemerintah baru yang sedang berkuasa hampir tidak memiliki kemampuan mengendalikan seluruh dinamika revolusi yang sedang bangkit tersebut. Tindakan anarki bersifat antiasing (kolonial), antifeodal, antipangreh praja. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari pada fase-fase permulaan revolusi, muncul huru-hara dan berbagai pergolakan sosial (Ibrahim, 2010: 4-5).

Pada gilirannya beberapa pergolakan sosial yang terjadi merepresentasikan corak revolusi Indonesia yang tidak hanya memperjuangkan eksistensinya, tetapi mengandung permasalahan-permasalahan sosial di dalamnya. Revolusi Indonesia tidak hanya menghadirkan konflik politik, tetapi juga konflik sosial (Ibrahim, 2010: 5). Dalam hal ini terjadi revolusi sosial yang ditandai dengan kemunculan kelompok-kelompok sosial penentang penguasa yang sering bertindak kriminal (Ibrahim, 2010: 16).

Ada dua alasan mengapa artikel ini ditulis dari segi *interesting* (menarik) dan *significant* (penting).¹ *Pertama*, dalam konteks Karawang, revolusi sosial menjadi menarik dilihat dari hubungan tentara, laskar, dan jago. Revolusi sosial bukan sekadar kekacauan dan avonturisme politik, tetapi bagaimana massa berperan dalam jalannya suatu perubahan. Ada ikhtiar untuk mengisi kekosongan politik berlandaskan tatanan baru yang

antikolonial. Apabila Anton Lucas (1989) mengemukakan istilah "revolusi dalam revolusi" dalam konteks pembongkaran struktur birokrasi lama dengan yang baru, penelitian ini melihat adanya tujuan-tujuan tertentu dalam tujuan bersama mempertahankan kemerdekaan.

Kedua, terkait dengan perluasan tema sejarah yang lokal sentris. Kecenderungan penulisan sejarah lokal di Karawang², khususnya periode perjuangan kemerdekaan lebih menitikberatkan pada Peristiwa Rengasdengklok. Hal tersebut menimbulkan kesan bahwa hanya itulah satu-satunya peristiwa penting yang terjadi di Karawang. Peristiwa lain seakan-akan kurang memiliki makna penting. Banyak peristiwa menarik yang terjadi pada periode itu, antara lain Peristiwa Cikampek dan Pembantaian Rawagede. Peristiwa yang disebut belakangan bahkan menjadi salah satu isu kesejarahan dan politik yang cukup panas, baik di Indonesia maupun di Negeri Belanda.

Kecenderungan tersebut agaknya karena masyarakat, khususnya peminat sejarah, lebih tertarik pada peristiwa yang berada pada level nasional. Padahal keberadaan sejarah lokal akan memperkaya sejarah nasional. Sejarah nasional cenderung mengalami pemitosan

¹ Menurut Sobana Hardjasaputra (2013), topik yang dipilih untuk menulis sejarah, tidak sembarang topik, tetapi harus memenuhi syarat tertentu, yaitu: menarik (*interesting topic*), memiliki arti penting (*significant topic*), dan dapat dikerjakan karena sumber-sumbernya tersedia dan dapat diperoleh (*manageable topic*).

² Karawang memiliki tiga varian dalam penyebutannya, yaitu "Kerawang", "Krawang" dan "Karawang". Dari segi toponimi, istilah Karawang memiliki beberapa versi. Istilah "Karawang" berasal dari kata 'Karawaan' yang mengandung arti daerah ini banyak terdapat rawa (Sudaryat, 2009: 65). Selanjutnya, "Karawang" berasal dari perubahan pelafalan 'Caravan'. Sejak abad ke-16 orang-orang Portugis menyebut kawasan yang sebagian tanahnya berawa tersebut dengan caravan atau *caravaon* (Lubis, 2011: 86). Berikutnya, "Karawang" berasal dari kata "Quro-wang". Quro berasal dari tempat Syeh Quro yang merupakan pasantren yang pertama ada di wilayah Tatar Sunda. Kata "wang" berasal dari "wong" yang berarti orang". Karawang juga berarti "dikarawang" yang bermakna tepi kain (selendang) yang diberi ornamen berlubang agar menjadi indah.

dan generalisasi. Sementara, sejarah lokal (*local voice*) memberikan corak peristiwa yang lebih dinamis dan unik.

Ruang lingkup spasial adalah Karawang sebagai wilayah administratif setingkat kabupaten. Karawang menjadi kabupaten dengan bupati pertama Raden Singaperbangsa bergelar Kertabumi IV yang dilantik 14 September 1633. Tanggal ini menjadi hari jadi Kabupaten Karawang. Kemudian bupati berikutnya adalah R. Anom Wirasuta 1677-1721, R. Jayanegara (gelar R.A. Panatayuda II) 1721-1731, R. Martanegara (R. Singanagara dengan gelar R.A. Panatayuda III) 1731-1752, R. Mohamad Soleh (gelar R.A. Panatayuda IV) 1752-1786. Pada periode ini terjadi peralihan penguasa dari Mataram kepada VOC.

Hingga tahun 1809, Karawang menjadi keresidenan, berubah menjadi kabupaten pada 1810, dan kembali menjadi keresidenan pada 1811. Pada 1813 status keresidenan dihapus. Selanjutnya, pada 1818 Karawang menjadi keresidenan kembali. Pada 1901 Karawang berubah lagi menjadi kabupaten di bawah Keresidenan Batavia, pada 1925 Karawang kembali menjadi keresidenan, dan 1931 Karawang menjadi kabupaten. Pada masa Pendudukan Jepang, ibu kota Karawang *Syi/Ken* berada di Purwakarta (Yulifar, 2016: 217). Pada masa revolusi, pusat Pemerintahan Kabupaten Karawang dipindahkan dari Purwakarta ke Subang. Ketika itu Kabupaten Karawang dipimpin Raden Juarsa.

Ruang lingkup temporal mencakup 1945-1947. Pada rentang waktu ini, eskalasi perjuangan kemerdekaan di Karawang semakin meningkat. Saat itu dapat dikatakan bahwa Karawang merupakan “rumah” bagi tentara dan laskar perjuangan. Banyaknya kelompok laskar, khususnya yang berhaluan kiri, mengakibatkan konflik dengan tentara. Selain itu, kehadiran para jago juga sering menimbulkan kekacauan.

Sejauh ini sumber sejarah tertulis yang tersedia selama periode tersebut

cukup banyak, tetapi masih merupakan tulisan yang lepas dan terpencar-pencar. Kebanyakan buku-buku yang diterbitkan membahas kronologi sejarah yang panjang. Meski demikian, ada juga buku yang lebih khusus, seperti biografi, namun bersifat deskriptif dan terfokus pada peran tokohnya.

Buku pertama yang patut disebut adalah *Sejarah Purwakarta* (2008) yang ditulis Sobana Hardjasaputra. Buku ini membahas perkembangan Purwakarta sejak masa penjajahan hingga Orde Baru. Dalam buku ini dijelaskan perjuangan kemerdekaan di wilayah Purwakarta yang ketika itu memiliki keterkaitan yang erat dengan Karawang secara kewilayahan.

Selanjutnya, *Sejarah Kabupaten Karawang* yang ditulis Nina Herlina Lubis *et al* (2011). Buku ini mengungkap perjalanan sejarah yang panjang sejak masa prasejarah hingga kemerdekaan. Secara khusus, ada bab tentang perjuangan kemerdekaan di Karawang. Meski demikian, agak kurang mengungkap relasi tentara, jago, dan laskar.

Robert Cribb menulis *Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949* (2010). Buku ini mengkaji secara khusus milisi rakyat yang tergabung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada 1945, yaitu Laskar Rakyat Jakarta Raya (LRJR). Laskar ini mengalami kehancuran di tangan tentara pada akhir 1940-an. Buku ini terfokus pada peran LRJR.

Referensi berikutnya yang berbicara mengenai gejolak revolusi di Karawang dan sekitarnya adalah *Jakarta-Karawang-Bekasi dalam Gejolak Revolusi: Perjuangan Moeffreni Moe'min* yang ditulis Dien Majid dan Darmiati (1999). Buku yang bersifat biografis tersebut yang memberi gambaran kelahiran para laskar dengan kelompok nasionalis muda radikal. Buku ini merekam perjuangan kemerdekaan dalam perspektif pelakunya.

Her Suganda menulis *Rengasdengklok, Revolusi dan Peristiwa 16 Agustus 1945* (2009). Buku ini mengulas perjalanan sejarah

Rengasdengklok mulai masa kemerdekaan hingga terjadinya kerusuhan 1997. Secara khusus meski terbatas, ada informasi mengenai penculikan Suroto Kunto oleh LRJR.

Sukarman HD, U. Warliayah, dan Li Wahyudin menulis *Sejarah Perjuangan Suroto Kunto Bersama Rakyat Karawang* (2006). Buku biografi mengulas riwayat hidup Suroto Kunto sejak menjadi mahasiswa hingga peristiwa penculikan 1947.

Warliayah *et al.* menulis *Sejarah Perjuangan Masyarakat Karawang dan Sekitarnya 1945-1950* (2003). Buku ini mendeskripsikan episode penting mulai dari Peristiwa Rengasdengklok hingga upaya mempertahankan kemerdekaan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh (Gottschalk, 1985: 39). Gilbert J. Garraghan (1957: 33) mendefinisikan metode sejarah sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan menyajikan sintesis dari hasil-hasil yang dipakai dalam bentuk tertulis.

Metode sejarah terdiri atas empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Garraghan, 1957: 34; Kosim, 1984: 36; Gottschalk, 1985: 32; Renier, 1997: 113; Lubis, 2015: 15). Tahap pertama, heuristik, yaitu kegiatan menemukan dan menghimpun sumber, informasi, dan jejak masa lampau. Pada tahap ini dilakukan pencarian sumber terhadap objek yang diteliti melalui penelitian di perpustakaan (*library research*). Literatur diperoleh melalui studi pustaka di Perpustakaan Dispusipda Jawa Barat, Perpustakaan BPNB Jawa Barat, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan Perpustakaan Universitas Indonesia.

Tahap selanjutnya adalah tahap kritik, yakni memilah, memilih, dan menyaring keotentikan sumber-sumber yang telah diperoleh. Peneliti mengkaji sumber-sumber yang didapat untuk mendapatkan kebenaran sumber. Pada tahap ini peneliti meneliti otentisitas sumber yang disebut kritik, dan kredibilitas sumber yang disebut kritik internal (Kuntowijoyo, 2013: 77-78). Selanjutnya dilakukan koraborasi suatu data dari suatu sumber sejarah dengan sumber lain (dua atau lebih) sehingga didapatkan fakta sejarah yang mendekati kebenaran.

Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu proses menafsirkan berbagai fakta menjadi sebuah rangkaian yang logis. Secara praksis, interpretasi dilakukan secara analitis (menguraikan fakta) dan sintesis (menghimpun fakta).

Tahap terakhir adalah penulisan sejarah atau historiografi. Historiografi didefinisikan sebagai pengkajian tentang penulisan sejarah. Fakta-fakta yang telah diinterpretasikan dituliskan dalam suatu penulisan yang sistematis dan kronologis.

Istilah “revolusi dalam revolusi” adalah suatu kerangka pemikiran. Kerangka pikir bagaimana nilai-nilai bersama suatu revolusi sering mengalami pengerasan dan pembiasaan. Perubahan yang berlangsung secara cepat menimbulkan gejala di dalamnya, yang sering tidak seiring sejalan dengan nilai-nilai yang dihayati bersama.

Eisentadt (1986: 5) menyebutkan lima citra revolusi yang berkembang dalam pandangan masyarakat dan literatur sebagai berikut:

- 1) Perubahan dengan cara kekerasan terhadap rezim politik yang ada, yang didasari oleh legitimasi masyarakat.
- 2) Penggantian elit politik atau kelas yang sedang berkuasa dengan kelas yang baru.
- 3) Perubahan secara mendasar seluruh bidang kelembagaan utama – terutama dalam hubungan kelas dan sistem ekonomi – yang menyebabkan

modernisasi di segenap aspek kehidupan sosial, pembaharuan ekonomi dan industrialisasi, serta menumbuhkan desentralisasi dan partisipasi dalam dunia politik.

- 4) Pemutusan secara radikal dengan segala hal yang telah lampau.
- 5) Memberikan kekuatan ideologis dan orientasi untuk melakukan perubahan.

Proses revolusi dipahami sebagai proses yang amat luar biasa, amat kasar, dan merupakan gerakan yang paling terpadu dari seluruh gerakan sosial apa pun. Dalam bahasa Alexis de Tocqueville, revolusi merupakan diskontinuitas yang relatif (pemutusan hubungan dengan masa lampau). Samuel P. Huntington dalam (Adisusilo, 2014: 1-25) menulis menyebut revolusi sebagai penjungkirbalikan nilai-nilai, mitos, lembaga-lembaga politik, struktur sosial, kepemimpinan, serta aktivitas maupun kebijaksanaan pemerintah yang dominan di masyarakat.

Dalam kerangka memahami hubungan tentara, jago (bandit), dan laskar dapat dilihat dari perspektif konflik. Konflik dapat disebabkan oleh faktor internal maupun tekanan dari luar. Dapat dikatakan bahwa konflik tentara dengan jago dan laskar bersifat kronis dan sporadis. Oleh karena itu, penting dipahami kedudukan dan peranan masing-masing.

Laskar berasal dari Bahasa Urdu *Lashkar* yang berarti tentara, pasukan, atau milisi. Selama masa Pendudukan Jepang, istilah laskar rakyat digunakan untuk menyebut *Gyugun* (pasukan sukarela), PETA versi lokal (Cribb, 2010: 96). Laskar terdiri atas satuan-satuan kecil atau gabungan dari beberapa satuan kecil. Laskar gerilya membantu tentara rakyat di kedua sayap atau di belakang front musuh, mengacau-balaukan pos, konvoi, perlengkapan, dan persiapan musuh (Nasution, 1968: 222-223).

Laskar membentuk pemimpin dan mengerahkan laskar rakyat secara besar-besaran atas dasar taktik gerilya dan dengan laskar gerilya sebagai pelopor.

Laskar gerilya membantu tentara resmi di semua tempat yang ditunjukkan oleh tentara resmi revolusioner (Nasution, 1968: 225).

Di wilayah yang dikuasai Belanda atau pegunungan yang terkepung oleh tentara musuh, laskar gerilya adalah sumber kekuatan RI non-TNI. Laskar gerilya memimpin pertempuran, politik, sosial, dan perekonomian rakyat (Nasution, 1968: 225-226).

Sejak akhir Mei 1945, sebutan laskar dipakai untuk menyebut kelompok-kelompok yang tadinya dikenal sebagai badan perjuangan, namun kemudian memiliki kondisi internal yang lebih luas (Cribb, 2010: 96).

Jago, bandit, atau jagoan merupakan istilah yang disematkan kepada pelaku kejahatan atau mereka yang bergerak dalam “dunia bawah” (*onderwereld*). “Dunia bawah” disebut juga “dunia hitam” yang ditandai dengan lingkungan sosial yang melawan norma hukum yang berlaku; dan kehidupan orang-orang yang melakukan kejahatan dan pelacuran (Fauzi, 2010: 5).

Peranan kelompok bandit sosial merupakan *counter-elite* yang bergerak di bawah tanah sehingga merupakan ancaman laten bagi yang sedang berkuasa. Seseorang menjadi bandit karena ia melakukan sesuatu yang oleh adat kebiasaan di daerahnya tidak dianggap sebagai tindakan kejahatan, melainkan negara atau penguasa setempat yang menganggapnya demikian (Hobsbawm, 1984: 76).

Perbanditan sosial dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial yang bertentangan dengan pihak yang berkuasa atau tertib masyarakat (Simandjuntak, 2005: 49). Dilihat dari segi dampaknya ada perbedaan antara perbanditan di pedesaan dan perkotaan. Meski di perkotaan sering terjadi perbanditan, namun di pedesaan lebih memberikan dampak pada masyarakat dalam skala luas (Pranoto, 2010: 9).

Pada masa revolusi, para bandit atau jagoan dihadapkan pada dua pilihan: menjadi seorang kriminal atau revolusioner. Namun, pada kenyataannya para jagoan itu mencampuradukkan dua dunia yang bertolak belakang itu untuk kepentingan pribadinya. Seorang penjahat sejati menganggap revolusi sebagai kesempatan baik untuk melakukan kejahatan. Seringkali, pemimpin bandit mencari legitimasi untuk revolusi dengan cara mengadopsi status formal seorang penguasa (Ibrahim: 2004, 221). Perlu dipahami bahwa gerakan revolusioner dan gerakan sosial dalam menumbangkan rezim tertentu diboncengi oleh kekuatan kaum kriminal. Kadang-kadang pejuang menjadi kriminal, tidak jarang pula kriminal terlibat dalam perjuangan (Ibrahim, 2010: viii).

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Kelahiran BKR dan Laskar-Laskar Perjuangan

Setelah proklamasi kemerdekaan kebutuhan akan adanya kekuatan militer yang cukup untuk menjaga keamanan dan ketentraman dirasakan semakin mendesak. Bahkan Oerip Soemohardjo pernah berujar, “aneh, sebuah negara *zonder tentara*”. Pada 23 Agustus 1945 dibentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat), yang bertujuan menjamin ketentraman umum. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, Presiden Soekarno melalui RRI mengumumkan agar di daerah-daerah sesegera mungkin dibentuk Badan Keamanan Rakyat (Ekadjati *et al.*, 1980: 94).

Pembentukan BKR di Jawa Barat, terutama dipelopori para bekas PETA, *Chudancho*, dan *Heiho*. Para pejuang di Karawang menyatukan tekad bergabung dalam BKR di bawah pimpinan Nagdon Suraji.

Pembentukan BKR dibarengi pula dengan lahirnya badan-badan kelaskaran. Tidak kurang dari 18 badan kelaskaran yang pernah muncul dan aktif di wilayah Jawa Barat (Disjarahdam VI Siliwangi,

1979: 23). Khususnya di Karawang berdiri beberapa badan kelaskaran yang berafiliasi dengan garis induknya sebagai berikut:

1. Barisan Banten Republik Indonesia (BBRI) pimpinan Moh. Kosim yang bermarkas di Gedung Pegadaian Cinangoh;
2. BPRI (Barisan Pejuang Republik Indonesia) pimpinan H. Agil Ahmad, bermarkas di sebelah markas BBRI (bekas Gedung Pagadaian);
3. Hisbulah pimpinan MO Sobandi, bermarkas di Gang Yanten (bekas pabrik penggilingan padi);
4. Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), dipimpin oleh Taryono Cayong, bermarkas di Pengasinan (sekarang Jalan Dr. Taruno);
5. SP 88 (Satuan Pemberontak) pimpinan A.S. Wagianto/Usman Somantri;
6. BR (Bambu Runcing) pimpinan Doyot;
7. Laskar Buruh;
8. Sabilillah; dan
9. Laskar Rakyat Jakarta Raya, dipimpin oleh J. Hasibuan (Idris, 2001: 9).

Salah satu isu penting yang mencuat pasca proklamasi kemerdekaan adalah pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang. Jepang tidak mau menyerahkan kekuasaannya ke pihak Indonesia, melainkan ke pihak Sekutu. Dalam situasi demikian, di daerah-daerah rakyat mengambil gerakan sendiri untuk melucuti tentara Jepang, termasuk di Karawang. Di antara laskar-laskar saling berlomba memperbanyak jumlah senjata sehingga sering terjadi konflik sesama mereka (Kosoh *et al.*, 1994: 217).

Pejuang di wilayah Karawang sejak meluasnya kabar penyerahan Jepang terhadap Sekutu sudah lebih dulu melakukan perlucutan tentara Jepang dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat. Menjelang “penculikan” Soekarno-Hatta, Rengasdengklok sudah berada di tangan pasukan PETA. Tentara Jepang berhasil ditawan dan dilucuti. Bendera *Hinomaru* diturunkan dan bendera merah putih dinaikkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Rengasdengklok

merupakan daerah pertama di Indonesia yang mengibarkan bendera merah putih.

Perlucutan terhadap tentara Jepang tidak hanya terjadi di Rengasdengklok, tetapi juga di Kota Karawang. Markas tentara Jepang yang diserang rakyat, antara lain Gedung *Hongbu* (sekarang menjadi Hotel Surya Kencana di Jalan Tuparev); Gedung *Ho Ceng Po* (sekarang di sebelah Swalayan Hero); Gedung Pegadaian tempat perwira tinggi Jepang atau *Kempetai* (sekarang dipakai oleh Corps Polisi Militer atau CPM), dan kantor Polisi setingkat resort di Gang Buntu Jalan Brikpol Nasuha. Tempat strategis tentara Jepang tersebut dapat direbut tanpa perlawanan yang berarti (Idris, 2001: 9; Lubis, 2011: 199).

Rakyat Karawang mencegat rombongan *kolone Kaigun* (Angkatan Laut Jepang) berkekuatan seratus orang yang melarikan diri dari Jakarta menuju Ciater (Hardjasaputra, 2008: 132). Pasukan Jepang tersebut dilucuti senjatanya, lalu dibunuh. Rakyat juga melakukan aksi penghadangan. Setiap kereta api dan mobil yang lewat harus melalui pemeriksaan ketat. Aksi rakyat bahkan lebih dengan menangkap dan membunuh pegawai polisi dan pamongpraja yang dicurigai memihak Jepang. Karena diketahui meminjam pistol dari Kamp *Kaigun*, rakyat menangkap Camat Wanayasa.

Di wilayah Purwakarta juga berlangsung perebutan senjata Jepang. Pada mulanya perlucutan senjata melalui aksi damai sebagaimana disepakati dalam rapat pimpinan KNID Purwakarta dengan sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda di Pasar Jumat. KNID Purwakarta meminta Bupati Juwarsa, Kepala Polisi Hidayat Sukarmawijaya untuk berunding dengan pimpinan tentara Jepang di Markas *Honbu Kempetai* Purwakarta. Misinya, agar semua persenjataan tentara Jepang diserahkan. Akan tetapi, perundingan dengan Jepang mengalami jalan buntu.

Mendengar kabar demikian, kelompok pemuda menyerbu markas *Rikugun* (Angkatan Darat Jepang) di

Purwakarta dan Wanayasa dari berbagai arah. Tentara Jepang tidak dapat menahan serbuan rakyat, karena jumlah penyerbu melebihi jumlah tentara Jepang. Dengan terpaksa, tentara Jepang menyerahkan senjata. Senjata rampasan itu kemudian dikumpulkan di Kantor Polisi Cipaisan (Hardjasaputra, 2008: 135).

Setelah peristiwa tersebut, sepasukan tentara Jepang bersenjata memasuki Kota Purwakarta dari arah selatan. Pasukan Jepang menawan bupati dan kepala polisi. Pimpinan pasukan Jepang menyatakan bupati dan kepala polisi akan dilepaskan, apabila senjata yang dirampas oleh para pemuda dikembalikan. Akhirnya, senjata yang telah dirampas dikembalikan, demi keselamatan bupati dan kepala polisi.

2. Gerakan Laskar dan Penyelesaian Konflik

Kedatangan Sekutu menciptakan situasi yang semakin meningkatkan konflik tidak hanya antara Sekutu dan NICA dengan kaum republiken, tetapi juga “kekuatan militer resmi” dengan “kelompok nonresmi”. Pertempuran meletus di mana-mana. Di Karawang, konflik antara tentara Sekutu dan Belanda dengan para pejuang telah melahirkan peristiwa penting, antara lain Peristiwa Cikampek dan Peristiwa Rawagede.

Konflik antara “kekuatan resmi” dengan “kelompok laskar” melibatkan TRI (Tentara Republik Indonesia) dengan Laskar Rakyat Jakarta Raya. Laskar ini hijrah ke Karawang setelah pemerintah menetapkan bahwa Jakarta menjadi kota internasional. Para pejuang tidak diizinkan berada di Jakarta. Pasukan yang hijrah sekitar tujuh ratus orang bersenjata paling lengkap dibandingkan laskar yang lain.

Ketegangan berlangsung karena adanya perbedaan pendapat antara TRI dengan Laskar Rakyat Jakarta Raya. Laskar Rakyat Jakarta Raya menentang dengan keras Perjanjian Linggajati yang melibatkan pemerintah Indonesia dengan

Belanda. Persoalan lain adalah penolakan mereka untuk diintegrasikan ke dalam tubuh TRI. Laskar bahkan sering memancing ketegangan dengan TRI (Sukarman *et al.*, 2006: 47). Laskar Rakyat Jakarta Raya menentang kebijakan yang ditempuh oleh Soekarno-Hatta yang dikatakannya "Soekarno penjual Bangsa, pengkhianat proklamasi" dan seterusnya.

Perihal tidak selarasnya Laskar Rakyat dengan tentara memang dapat dilihat dari status para pemimpinnya. Beberapa pimpinan Laskar Rakyat merupakan anggota dinas rahasia Belanda di bawah pimpinan Letkol. Agerbeel dan Kol. Drost.

Di sepanjang jalan Karawang, Laskar Rakyat sering pamer kekuatan sambil menyanyikan lagu *Darah Rakyat* (Sukarman *et al.*, 2006: 48).

*Darah rakyat masih berjalan
Menderita sakit dan miskin
Pada datangnya pembalasan
Kita yang menjadi hakim.
Hayo. Hayo bergerak sekarang
Kemerdekaan 'tlah datang
Merahlah panji-panji kita
Merah warna darah rakyat (2x)*

Pertahanan Jakarta Timur (Karawang) tidak mudah untuk dikendalikan. Laskar Rakyat Jakarta Raya bukan saja tidak mau bergabung, malahan memperlihatkan sikap permusuhan dengan pihak TRI. Aksi liar Laskar Rakyat Jakarta Raya (LRJR) semakin tidak terkendali. Mereka menyerang pos-pos TRI di sekitar Lemahabang-Cikarang. Konflik bersenjata berlangsung dengan hebat.

Pada pertengahan tahun 1947, berlangsung pertemuan di Kedung Gede. Menteri Pertahanan RI memutuskan agar di Karawang dibentuk Detasemen Gerak Cepat untuk menyatukan wadah perjuangan rakyat. Anggotanya berjumlah 150 orang, dari berbagai unsur, antara lain BPRI, PBRI, PESINDO, Laskar Buruh, Hizbullah, dan Sabilillah. Hal tersebut juga sebagai upaya membangun komunikasi yang lebih baik dengan pihak

TRI. Dalam perundingan itu, Laskar Rakyat Jakarta Raya tetap menolak untuk menggabungkan diri.



Gambar 1. Tugu Pimpinan Resimen V
Cikampek

Sumber: Dok. Iim Imadudin, Januari 2018.

Salah satu Laskar Rakyat yang berkedudukan di Lamarin yang dipimpin Sujono memasuki kota untuk bergabung dengan laskar yang lain. Tujuannya untuk merebut kota yang dikuasai TRI. Komando Keamanan Kota (K3) Karawang tidak mampu menghadapi kekuatan LRJR yang menciptakan kekacauan di penjuru kota.

Pimpinan Resimen Cikampek menjadi sasaran tindakan liar Laskar Rakyat Jakarta Raya. Sejumlah perwira diculik dan dibunuh pada tanggal 28 November 1946 setelah kembali dari perundingan di Kedung Gede. Mayor Suroto Kunto dan Kepala Staf Kapten Adil Sofyan beserta dua orang pengawal masing-masing bernama Kopral Muhajar dan Prajurit Murad menjadi sasaran kekejaman laskar rakyat (Rivai, 1983: 160; Warliyah, 2003: 77; Lasmiyati *et al.*, 2012: 69). Agaknya kejadian tersebut dipicu oleh gaya Suroto Kunto yang cenderung tegas dan memaksa dibandingkan upaya yang lebih halus untuk meminta bantuan para laskar. Suroto Kunto³ berbeda dengan

³ Dilihat dari riwayat hidupnya, Suroto Kunto termasuk pemuda radikal yang tidak mau kemerdekaan Indonesia dipengaruhi Jepang. Sejak menjadi mahasiswa *Ikadaigaku* (sekolah

Mufreni. Hubungan tentara dengan LRJR semakin memburuk (Cribb, 2010: 153).

Beredar spekulasi bahwa Suroto Kunto tidak dibunuh oleh laskar rakyat yang iri dengan pengangkatannya selaku komandan resimen, namun oleh intel-intel Belanda (Matanasi, 2012: 43). Pendapat ini diperkuat oleh Robert Cribb, bahwa upaya pembunuhan tersebut sebagai cara untuk melemahkan kekuatan Republik.

Penculikan tersebut berlangsung sepulang melakukan perundingan dengan Dewan Pimpinan Laskar Rakyat Jakarta Raya (LRJR) di Bekasi. Namun sekebalinya dari berunding keempatnya diculik di daerah Warungbambu, sebuah daerah yang terletak di sisi jalan raya Karawang-Cikampek. Keempatnya dinyatakan hilang. Mobil yang ditumpanginya ditemukan penuh bercak darah oleh salah satu ajudannya, Kapten Mursyid, pada 28 November 1946 sekitar pukul 01.00 dini hari. Jasadnya dan jasad para pengawalinya tidak pernah ditemukan sampai sekarang ini. Keberadaan Suroto Kunto dinyatakan *vermist* (hilang).



Gambar 2. Tugu Suroto Kunto

Sumber: Dok. Iim Imadudin, Januari 2018.

Aksi Laskar Rakyat Jakarta Raya semakin membahayakan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Pimpinan pihak TRI melakukan tindakan tegas

terhadap Laskar Rakyat Jakarta Raya. Komandan Brigade Purwakarta, Letkol Daan Jahja segera bergerak ke Karawang. Kekerasan berdarah antara TRI dengan Laskar Rakyat Jakarta Raya berlangsung dengan sengit.

Pasukan Laskar Rakyat Jakarta Raya berhasil dilumpuhkan. Pemimpin-pemimpin dan anggota-anggota yang tertangkap atau menyerahkan diri dibawa ke Kalijati Subang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukan laskar yang berhasil melarikan diri bergabung dengan HAMOT (*Hare Majesteit's Ongeregelde Troepen*) atau Laskar Sri Ratu.

Bersama anak buahnya, Daan Jahja menahan salah satu pemimpin laskar bernama Darwis, agar dapat ditukar bila Suroto Kunto diculik dalam keadaan hidup (Cribb, 2010: 129).

Kabar keberadaan Suroto Kunto belum menemukan titik terang. Darwis hampir dibunuh bila AH Nasution tidak mencegahnya. Akibat kejadian itu, Daan Jahja dipindahkan dari Brigade Purwakarta ke Tasikmalaya, dan digantikan Letkol Sidik Brotoatmodjo.

Upaya pembersihan laskar-laskar yang membangkang tidak dapat berjalan dengan mudah. Belanda terus mengganggu di sejumlah titik garis demarkasi antara tentara Belanda dan TRI di pinggir timur Kota Jakarta, tepatnya antara Tambun sampai Karawang.

Oleh karena itu, TRI meminta pemakluman tentara Belanda agar tidak membuka front pertempuran sampai urusan dengan laskar selesai. Sidik Brotoatmodjo mengirim telegram ke Komandan Brigade II dari Divisi 7 Desember Kolonel Thompson di Bogor dan panglimanya di Jakarta. Pada April 1947, TRI bergerak mengepung LRJR, BPRI dan KRIS. Mereka digempur TRI Siliwangi atas perintah Nasution.

Selain aksi anarkis LRJR, Polisi-Tentara (PT) pimpinan Wiwiek Hadi Bei pada bulan November 1945, menangkap lima anggota laskar rakyat Karawang

kedokteran), ia terkenal pemberani, vokal, bahkan Jepang menyebutnya pemberontak (Sukarman *et al.*, 2006: 14). Ia juga bagian dari kelompok muda yang mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.

(mungkin anggota KRIS), karena melakukan kerusuhan, perampasan, bahkan pembunuhan di Purwakarta. Mereka yang ditangkap kemudian ditembak mati. Kejadian ini menimbulkan ketegangan antara TKR dengan laskar rakyat Karawang (Hardjasaputra, 2008: 142).

Konflik tentara pemerintah dengan laskar sebenarnya merupakan bagian dari dinamika perjuangan. Dalam proses keberadaannya, TKR dan laskar rakyat mempunyai tugas masing-masing yang jelas. Tentara harus disusun sebagai tentara dan rakyat sebagai partisan rakyat (Ekadjati *et al*, 1980: 123).

Konflik antarfaksi perjuangan sebenarnya sudah dapat diperkirakan. Pemimpin Laskar Hizbullah, KH Noer Ali tidak mendukung keputusan laskar-laskar di Bekasi-Karawang, untuk berpolitik dan mengambil kebijakan sendiri di luar pemerintah. KH Noer Ali memutuskan mundur sebagai Ketua Laskar Rakyat Bekasi sebelum berlangsung konflik antara TRI dan LRJR. KH Noer Ali tidak berterima LRJR memprakarsai Persatuan Perjuangan (PP) dan upaya menarik Laskar Rakyat Bekasi ke dalamnya.⁴

Sebagai upaya mengendalikan situasi, Jenderal Kartasmita mendirikan markas komandemen di Purwakarta. Ia melakukan tindakan pembersihan dan penertiban situasi di wilayah Karesidenan Jakarta yang penuh kekeruhan. *Rust en orde* diutamakannya. Panglima komandemen melindungi pegawai dan pejabat administrasi yang sering diancam para jago dan laskar. Komandemen menangkap kelompok Mayor Baron, penyidik militer MTTKR Yogyakarta yang bemarkas di Gunung Puteri, sebelah selatan Purwakarta. Mereka membunuh Kepala Stasiun Padalarang setelah terjadi pertengkaran. Kelompok ini membunuh orang-orang yang menjadi musuhnya.

⁴<https://news.okezone.com/read/2017/03/03/338/1633102/news-story-konflik-pelik-tentara-republik-vs-laskar-di-pinggir-jakarta>, diakses 5 Januari 2018 Pukul 10: 23 WIB.

Banyak mayat ditemukan setelah kuburan digali. Demikian pula, barang dan hewan ternak milik rakyat yang dirampas kelompok ini (Nasution, 1973: 529).

Pada masa revolusi, laskar memiliki kekuasaan yang besar. Mereka memiliki pengaruh dan kontrol atas keluar-masuk barang dari dan ke suatu daerah di wilayah kekuasaan mereka. Di Karawang, laskar setempat melakukan tugas atau bertindak seperti polisi. Stasiun Karawang yang menjadi salah satu pintu masuk arus barang ke kota ini berada di bawah penguasaan laskar. Barang-barang yang tiba di Stasiun Karawang tidak dapat diambil langsung oleh pemilik tanpa seizin dan mempergunakan nama badan perjuangan, atau setidaknya atas sepengetahuan badan perjuangan setempat.

Selain itu, di tapal batas wilayah musuh tumbuh beberapa pasar gelap seperti Rawaroke, Jarakesta, dan Pasirlimun. Pasar gelap tersebut beroperasi atas perlindungan orang-orang yang berpengaruh di tempat seperti Djole (Rawaroke) dan Camat Cibitung, Nata, dibantu oleh Komin alias Akang. Diduga kuat Komin adalah jagoan setempat yang membantu pekerjaan Camat Nata di wilayah kekuasaannya.

Para tokoh masyarakat tidak memakai pengaruhnya untuk menghentikan penyelundupan ini, bahkan ada yang menjadi pelindung. Termasuk ketika polisi akan membubarkan pasar gelap tersebut.

Polisi sering merasa kesulitan ketika melakukan pemeriksaan di kereta api karena dirintangi laskar dari Karawang. Pihak Djawatan Kereta Api dan Polisi Kereta Api memperoleh perlakuan yang tidak mengenakkan (Fauzi, 2010: 71-72).

3. Aksi-aksi para Jago dan Penyelesaian Konflik

Pada permulaan revolusi, para pejuang di Karawang tidak hanya berhadapan dengan tentara Jepang, tetapi juga kelompok-kelompok yang merongrong kemerdekaan. Mereka

mencari kesempatan dalam kesempitan untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan.

Upaya perlucutan tidak hanya dilakukan “tentara resmi”, tetapi juga oleh kelompok-kelompok liar yang dikategorikan E.J. Hobsbawm sebagai bandit sosial (Kartodirdjo, 1984: 74).

Di Karawang jawara memiliki peranan yang sangat kuat. Kelompok jawara sering membuat suasana menjadi kacau. Pamongpraja dan polisi tidak mampu mengatasi keadaan. Kebanyakan dari mereka ragu mengambil keputusan, bahkan tidak sedikit yang meninggalkan tugasnya (Ekadjati et al., 1980/1981: 91).

Salah satunya adalah sekelompok jawara yang dipimpin oleh Ki Bubar. Pemimpin para jawara melaksanakan kedaulatan republik dengan bertindak sendiri. Kekuasaan lokal seperti republik-republik sendiri. Mereka memiliki kemampuan memengaruhi rakyat. Para pamongpraja yang berasal dari warisan zaman kolonial atau kaum feodal menjadi sasaran kemarahan kelompok jawara (Nasution, 1973: 527, 529).

Mereka bertindak sangat agresif dengan memegang senjata eks polisi (*steyer*) yang sudah dimodifikasi. Dengan pengikut sebanyak 150 orang, Ki Bubar melakukan aksi pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang dengan cara yang membabi-butu. Hal tersebut sering membuat suasana menjadi tidak terkendali (Idris, 2001: 9). Mereka menghadang iring-iringan tentara Angkatan Laut Jepang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Ciater. Pasukan Jepang yang dilucuti dibunuh semuanya (Ekadjati et al., 1980/1981: 91).

Sasaran serangan mereka tidak hanya orang Jepang, termasuk juga orang-orang pribumi. Para pegawai kawedanaan mereka usir, dan kantornya diambil alih, bahkan detasemen polisi senjatanya mereka lucuti. Aksi-aksi sepihak dari kelompok Ki Bubar menjurus pada kriminalitas, seperti perampokan dan pembunuhan di sepanjang jalan Karawang-

Tambun-Klender (Nasution, 1992: 334). Lama kelamaan terbukalah identitas yang sesungguhnya dari gerakan Ki Bubar. Mereka tidak lebih dari sekumpulan perampok yang melakukan aksinya di daerah Pangkalan, Teluk Jambe, dan Gorowong (Idris, 2001: 5).

Aksi Ki Bubar telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Para pemimpin mengadakan perundingan untuk meminta bantuan pejuang yang ada di Purwakarta. KNID Purwakarta selaku otoritas resmi mengambil tindakan tegas.

Akhirnya disiapkan rencana penyergapan dengan berpura-pura mengadakan latihan baris-berbaris untuk mengelabui gerombolan Ki Bubar. Operasi penangkapan dipimpin eks Chudanco Sumarna dan perwira-perwira PETA. Sebagian tentara pelajar dan Barisan Pelopor ikut serta dalam operasi tersebut. Latihan baris-berbaris diadakan di alun-alun kawedanaan, dekat dengan kantor kawedanaan yang dikuasai gerombolan (Idris, 2001: 6).

Siasat tersebut sesuai dengan harapan. Anggota gerombolan yang berada di gedung kawedanaan tidak menyadari adanya bahaya. Mereka asyik menonton latihan berbaris. Pasukan yang sedang latihan berbaris sudah bersiap menunggu komando. Tidak lama, terdengar komando agar pasukan bertiarap dan menembak. Benar saja, berondongan peluru diarahkan ke posisi gerombolan Ki Bubar.

Pada mulanya pasukan Ki Bubar menduga bahwa aksi ini merupakan latihan militer biasa. Namun, setelah menyadari telah terjadi sesuatu yang tidak beres, pasukan Ki Bubar benar-benar panik. Sebagian anggota gerombolan tertembak, dan sebagian lain melarikan diri, terutama ke arah Kali Citarum. Namun ternyata, pinggiran Kali Citarum sudah dijaga tentara dan laskar. Muncul peringatan bahwa siapa saja yang mencoba terjun ke Kali Citarum akan ditembak mati. Mereka yang tertangkap kemudian dibawa ke Gedung *Hongbu*, markas Barisan Pelopor. Di markas, anggota gerombolan

diinterogasi. Mereka yang bersalah ditembak mati dan mayatnya dibuang ke Kali Citarum (Idris, 2001: 6).

Ketika serangan dilancarkan, Ki Bubar dalam perjalanan kembali menuju kantor kawedanaan dengan menunggang kuda. Saat dilihatnya tentara sudah memasuki kantor kawedanaan, ia menyelinap masuk melalui bagian belakang gedung. Begitu mengetahui keberadaan Ki Bubar, tentara langsung mengejanya. Ki Bubar mencoba melarikan diri dengan cara menghilang. Ia memiliki keyakinan terhadap hal-hal yang bersifat spiritual. Namun, tindakan tersebut tidak berhasil. Ia terus berlari menuju Kali Citarum. Tentara dan rakyat menghabisinya ketika muncul. Gerakan Ki Bubar dan anak buahnya berhasil ditumpas (Cribb, 2010: 123; Nasution, 1973: 528; Suganda, 2009: 98). Di sekitar Cikampek dan Rengasdengklok ada seorang jago bernama Lempoeg Bapa Emah. Lempoeg merupakan narapidana yang lari dari penjara Cirebon pada pertengahan Juni 1946.

Ia tertangkap dalam aksi penangkapan di Kampung Plawad, Desa Selang, Kecamatan Telagasari, Cikampek, pada 28 September 1946. Ketika itu, polisi meminta informasi dari penduduk sekitar tentang tempat persembunyian Lempoeg. Karena ketakutan, penduduk bukan saja tidak mengetahui lokasi persembunyian Lempoeg, bahkan tidak mengenalnya. Namun polisi berhasil mengepungnya, Lempoeg melawan dan mencoba menghunuskan golok ke arah polisi yang berusaha meringkusnya. Aparat keamanan menembaknya hingga tewas (Fauzi, 2010: 71).

Gerombolan Pa Gelung juga sering melakukan kekacauan. Markas Pa Gelung berada di Desa Kuta Gandok Rengasdengklok. Jumlahnya ratusan orang. Kelompok Pa Gelung merupakan kelompok sekte keagamaan bercampur mistik. Anggotanya gemar memakai jimat. Bahkan, ada laporan dari TKR, mereka tidak perlu beribadah haji ke Ka'bah,

karena dapat dilakukan di tempat mereka sendiri (Nasution, 1973: 528). Mereka menyerang markas tentara sambil mengacungkan tongkat serta melambai-lambai kain, yang menurut anak-anak, "nampaknya berkilat-kilat dan berwarna kemerah-merahan". Mereka yakin tidak mempan ditembak. Pada mulanya memang tidak jatuh korban. Namun, pasukan eks PETA dan HEIHO berhasil melumpuhkan gerombolan Pa Gelung. Pa Gelung berhasil ditangkap dan dibawa ke markas para pejuang (gedung *Ho Ceng Po*). Pimpinan gerombolan tersebut diarak keliling kota, dan akhirnya tewas dengan cara mengenaskan di depan Stasiun Kereta Api Karawang (Idris, 2001: 6).

Kelompok jago Pa Belah berkuasa di kawasan Cikampek. Ia sering menyamun kendaraan yang melintasi wilayah kekuasaannya. Ia mencegat Abdul Kadir, anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, saat melintasi wilayah Karawang. Abdul Kadir diprovokasi sebagai NICA yang menjadi tangan kanan van Mook (Nasution, 1973: 528). Ia memanfaatkan ketakutan rakyat dengan berganti-ganti istri di daerahnya. Tentara terpaksa melakukan aksi penumpasan. Tentara mencoba menangkapnya, ketika Pa Belah sedang melangsungkan perkawinan. Ia ditembak mati di bawah tempat tidur, tempatnya menyembunyikan diri (Nasution, 1973: 528).

Di penghujung September 1945, beberapa orang yang mengaku "utusan republik" dari Kota Jakarta. Mereka membawa "instruksi" yang harus diindahkan rakyat Purwakarta (Hardjasaputra, 2008: 133).

Tidak lama setelah itu masuk satu pasukan dari Jakarta yang menyebut dirinya "Barisan Berani Mati" datang ke Purwakarta. Mereka terdiri atas orang-orang bekas narapidana di Cipinang. Mereka melakukan agitasi di Purwakarta, berusaha memengaruhi rakyat mengusir pasukan Sekutu yang datang 29 September 1945 (Hardjasaputra, 2008: 133).

Upaya memprovokasi rakyat terus dilakukan. Salah satunya, mobilisasi massa di gedung bioskop. Pemimpin barisan tersebut berpidato dengan berapi-api memanaskan suasana. Seraya mengacungkan pistol, ia mengeritik sikap para pemimpin Indonesia yang dianggapnya lemah. Sikap dan tindakan “Barisan Berani Mati” itu tidak memperoleh dukungan rakyat (Hardjasaputra, 2008: 133).

Komandan Barisan Pelopor Purwakarta, Ishak Iskandar, menentang aksi-aksi “Barisan Berani Mati”. Keadaan makin memanas. Serombongan pemuda dari Jakarta menuntut mati pemimpin “Barisan Berani Mati”. Bupati dan kepala polisi, bereaksi dengan menangkap pemimpin “Barisan Berani Mati”. Namun, kemudian dilepaskan dengan syarat harus ke luar dari daerah Purwakarta. Kelompok ini tidak boleh menghasut rakyat (Hardjasaputra, 2008: 133).

Setelah lenyapnya “Barisan Berani Mati”, muncul gerakan lain. Pegawai kehakiman bernama Simanjuntak bergabung dengan Barisan Pelopor Karawang. Bersama teman-temannya, ia melakukan tindakan di luar kontrol KNID setempat dengan membentuk “kantor keresidenan” di Karawang (Hardjasaputra, 2008: 134).

Simanjuntak mendeklarasikan dirinya sebagai “residen”. Ia membentuk pasukan, terdiri atas para jawara. Mereka mengangkat Pak Bubar menjadi “bupati” yang berkedudukan di kantor Kewedanan Karawang yang telah kosong sejak awal kemerdekaan. Untuk menguatkan eksistensinya, mereka menciptakan teror di kalangan rakyat.

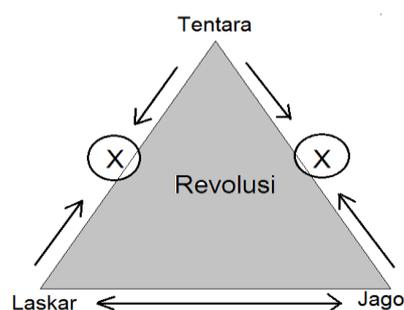
Simanjuntak berkirim utusan ke Purwakarta untuk menyelenggarakan rapat dengan rakyat. Pada rapat pertama, dijelaskan oleh Simanjuntak mengenai pengangkatannya “residen” oleh presiden (Hardjasaputra, 2008: 134).

Tentu saja pernyataan Simanjuntak tidak dipercayai oleh rakyat. Pada waktu itu residen tidak diangkat oleh presiden,

melainkan ditunjuk KNID. Pernyataan Simanjuntak menimbulkan kerusuhan. Ia ditangkap dan pasukan pengawalnya dilucuti. Kerusuhan tersebut berdampak pada penggantian Ketua KNID (Hardjasaputra, 2008: 134).

Situasi masih tetap kacau. Setelah berdirinya Komandemen TKR dan laskar-laskar rakyat di Purwakarta, keadaan menjadi kondusif. Satu per satu aksi kelompok pengacau ditumpas, antara lain kelompok Pak Bubar, gerombolan Pak Belah, kelompok jawara Sukamandi pimpinan Pak Bontan, dan para pengacau di daerah Gunung Putri sampai Padalarang.

4. Analisis



Aksi-aksi para laskar dan jago dapat dilihat dalam tiga perspektif. *Pertama*, negara belum sepenuhnya menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara baik. Pascarevolusi, pemerintah tidak menjamin kehidupan di masyarakat berjalan normal dan damai. Janji-janji revolusi dan harapan kesejahteraan tak kunjung tiba. Di bidang ekonomi tidak ada perubahan yang memadai. Makanan dan pakaian menjadi kebutuhan yang sulit terpenuhi. Realitas politik dan ekonomi yang berlangsung saat itu meredupkan harapan, padahal kemerdekaan sudah diproklamasikan.

Rakyat belum siap menyambut kehidupan damai atau normal pascarevolusi. Eks pejuang atau laskar masih membayangkan hidup seperti di masa perjuangan dulu. Kedaruratan tampak dalam hal respons mereka terhadap situasi baru ini. Senjata api sisa-sisa perjuangan masih ada dalam genggamannya mereka (Fauzi, 2010: 61). Kebanyakan

anggota laskar rakyat berasal dari golongan tidak terpelajar. Mereka tidak terbiasa dengan kedisiplinan tinggi, apalagi saat membawa senjata. Masuknya laskar dalam distribusi sandang dan pangan di Karawang dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi. Anggota laskar secara sepihak mengambil alih peran dan wewenang aparat keamanan.

Dalam kaitan ini, sebagaimana dikatakan Taufik Abdullah dalam (Majid dan Darmiati, 1999: xiii), para laskar perlu melakukan reinterpretasi kreatif dan konstruktif di dalam suasana revolusi yang hidup dalam dirinya ke dalam kehidupan sehari-hari yang terus berubah.

Kedua, secara ideologis, para pemimpin laskar umumnya menganut aliran politik kiri dan radikal. Mereka sering melakukan oposisi terhadap pemerintah. Laskar terbesar di front timur Jakarta memiliki garis politik berseberangan dengan pemerintah Perdana Menteri Sjahrir. Laskar Rakyat Jakarta Raya (LRJR) dengan tegas menolak Perjanjian Linggajati. Keterdesakan mereka dari Jakarta sehingga memasuki Karawang sedikit-banyaknya dipengaruhi oleh adanya tekanan yang kuat di Jakarta. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa katup-katup konflik menyumbat di Jakarta sehingga merembes ke wilayah pinggiran.

Ketiga, konflik yang terjadi antara tentara dan laskar banyak dipengaruhi oleh cara pandangnya. Para nasionalis kiri yang menjadi pimpinan laskar menunjukkan ketidakpercayaannya pada tentara nasional. Pimpinan tentara yang berasal dari eks KNIL dan PETA dianggap sebagai warisan penjajah yang berjiwa fasis. Fasisme dipandang lebih berbahasa dari kolonialisme. Pimpinan tentara seperti Nasution dianggap tidak ubahnya "agen NICA" yang ingin melumpuhkan pertahanan rakyat (Gie, 1999: 93).

Sementara itu, pimpinan tentara memandang pentingnya tentara memiliki wawasan politik yang luas dan tidak hanya menjadi alat yang mati dari pemerintah. Pertahanan negara harus disusun secara

efisien dengan komando yang ketat. Didirikannya laskar-laskar bersenjata justru menjadi hambatan alam perjuangan. Laskar bersenjata bertempur mengikuti garis induknya, tanpa komando sentral di tangan tentara.

Ketidakpercayaan demikian yang membuat Ki Bubar dan Pak Belah menyerang tentara dan pejabat pribumi yang dianggapnya sebagai antek kolonial. Pimpinan *Barisan Berani Mati* dan *Simanjuntak* yang menetapkan dirinya sebagai penguasa baru menunjukkan ketidakpercayaan terhadap pejabat lokal yang dianggapnya tidak memiliki legitimasi.

Dalam kasus LRJR terdapat gambaran yang jelas bagaimana bersekutunya para jago dengan tokoh laskar yang berasal dari kaum nasionalis kiri. Relasi yang terjadi di antara mereka bersifat simbiosis mutualistis. Para jago berharap di masa depan dengan keterlibatan kaum nasionalis kiri akan memberi legitimasi bagi keberadaan mereka. Sementara itu, bagi kaum nasionalis kiri, para jago mampu memberi perlawanan fisik yang dapat diandalkan.

Aksi-aksi sepihak para laskar rakyat dan jago tidak saja meresahkan masyarakat, tetapi juga menciptakan instabilitas. Tentara dalam situasi sulit, karena di saat yang sama mereka menghadapi kekuasaan asing yang hendak berkuasa kembali. Kontrol yang cenderung lemah terhadap daerah-daerah yang bergolak memudahkan laskar rakyat dan jago melakukan kekerasan.

D. PENUTUP

Di wilayah Karawang, tentara tidak saja berhadapan dengan kekuatan asing yang mencoba berkuasa kembali, tetapi juga tantangan internal. Tantangan yang dimaksud aktivitas para jago dan pihak laskar yang bergerak liar.

Kemunculan gerakan-gerakan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, aksi-aksi anarkis merupakan respons terhadap situasi pada permulaan revolusi kemerdekaan. Keyakinan yang

kuat pada masa perjuangan kemerdekaan dihadapkan dengan suasana ketidakpastian dan euforia yang terus memuncak. Pada gilirannya menimbulkan konflik. Cita revolusi yang tidak kunjung terealisasi dan kegagalan pemerintah mengontrol keadaan menimbulkan anarkisme di tengah upaya mempertahankan kemerdekaan yang belum lama diproklamasikan.

Kedua, pimpinan laskar yang berhaluan kiri cenderung mengambil peran sebagai oposisi pemerintah. Dengan kondisi demikian, mereka juga tidak sejalan dengan kebijakan pimpinan tentara.

Ketiga, ada stigma yang melekat kuat dalam pemikiran masing-masing. Pimpinan laskar memperlihatkan ketidakpercayaannya terhadap pimpinan tentara yang dianggapnya fasis. Sementara, pimpinan tentara beranggapan, keberadaan laskar dan jago menjadi hambatan dalam perjuangan.

Kombinasi ketiga faktor menjadi penyebab mengapa keadaan di wilayah Karawang menjadi demikian dinamis. Wilayah yang menjadi “pangkal perjuangan” menyimpan revolusi sosial yang hebat, terutama pada tahun-tahun pertama setelah kemerdekaan.

DAFTAR SUMBER

1. Jurnal, Tesis, dan Makalah

- Adisusilo, Sutarjo J.R.
 “Revolusi Bolsheviks”, dalam *Historia Vitae* Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah, Vol. 28, No. 1, April 201, hlm. 1-25.
- Fauzi, Muhammad. 2010.
Jagoan Jakarta dan Penguasaan di Perkotaan, 1950-1966. Tesis. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Ilmu Sejarah.
- Hardjasaputra, Sobana.
 “Metode Penulisan Sejarah”, *Makalah Seminar “Penanaman Nilai-Nilai Kesejarahan di Jawa Barat”* tanggal 26-27 Maret 2013 di Hotel Savoy Homann, Bandung.
- Idris, HM. 2001.
 “Peristiwa Karawang Kota dan Sekitarnya pada Masa Revolusi”, *Makalah disampaikan pada acara Temu Tokoh dan Seminar Sejarah “Refleksi Nilai-nilai Juang ‘45”* di Karawang.
- Simandjuntak, Peninna.
 “Gerakan Sosial sebagai Peristiwa Sejarah”, dalam *Historisme*, Edisi No. 21 Agustus 2005, hlm. 46-55.
- Yulifar, Leli.
 “Purwakarta: Dari Ibukota Kabupaten Karawang Menjadi Kabupaten Mandiri”, dalam *Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, 9 (2) November 2016, hlm. 213-220.

2. Buku

- Cribb, Robert. 2010.
Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949. Jakarta: Masup.
- _____. 1986.
Revolusi dan Transformasi Masyarakat. Terj. Candra Johan. Jakarta: Rajawali.
- Ekadjati, Edi, Sobana Hardjasaputra, Ian Tiansah, Emon S. 1980/1981.
Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat. Jakarta: Ditjarahnitra Depdikbud.
- Garraghan, Gilbert J. 1957.
A Guide To Historical Method. New York: Fordham University Press.
- Gie, Soe Hok. 1999.
Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan. Yogyakarta: Bentang.
- Gottschalk, Louis. 1985.
Mengerti Sejarah. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hardjasaputra, A. Sobana. 2008.
Sejarah Purwakarta. Purwakarta: Pemerintah Kabupaten Purwakarta Badan Pariwisata.
- Hobsbawm, E.J., “Bandit Sosial”, dalam Sartono Kartodirdjo, (1990), *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, Jakarta : LP3ES, hlm: 74-94.
- Ibrahim, Julianto. 2002.
Bandit dan Pejuang di Persimpangan Bengawan: Kriminalisasi dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta 1945-1950. Yogyakarta: Bina Citra Pustaka.

- Kahin, Audrey. 1979. *Perjuangan Kemerdekaan: Sumatera Barat dalam Revolusi Nasional Indonesia*. Terj. Tim MSI Sumbar. Padang: MSI Sumbar-ex Tentara Pelajar Sumatera Tengah.
- Kosim, E. 1984. *Metode Sejarah: Asas dan Proses*. Bandung: Universitas Padjadjaran Fakultas Sastra.
- Kosoh S., Suwarno K, Syafei. 1994. *Sejarah Jawa Barat*. Jakarta: Depdikbud.
- Kuntowijoyo, 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lasmiyati, Adeng, Iim Imadudin, M. Halwi Dahlan, Euis Thresnawaty. 2012. *Tokoh-tokoh Perjuangan Rakyat Jawa Barat*. Bandung: Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Lubis, Nina Herlina *et al.* 2011. *Sejarah Kabupaten Karawang*. Karawang: Disbudpar Kabupaten Karawang.
- Lubis, Herlina. 2015. *Metode Sejarah*. Jawa Barat: Yayasan Sejarawan Masyarakat Indonesia.
- Lucas, Anton E. 1989. *Peristiwa Tiga Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Majid, Dien dan Darmiati. 1999. *Jakarta-Karawang-Bekasi Dalam Gejolak Revolusi: Perjuangan Moeffreni Moe'min*. Jakarta: Keluarga Moeffreni Moe'min.
- Matanasi, Petrik. 2012. *Prajurit-prajurit di Kiri Jalan*. Yogyakarta: Trompet Book.
- Nasution, A.H. 1968. *Tentara Nasional Indonesia II*. Jakarta: seruling Masa.
- _____. 1973. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia 2: Diplomasi atau Bertempur*. Bandung: Disjarah AD-Angkasa.
- Pranoto, Suhartono W. 2010. *JAWA (Bandit-bandit Pedesaan); Studi Historis 1805-1942*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Renier, G. J. 1997. *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudaryat, Y. 2009. *Toponimi Jawa Barat (Berdasarkan Cerita Rakyat)*. Bandung: Disbudpar Provinsi Jawa Barat.
- Suganda, Her. 2009. *Rengasdengklok, Revolusi dan Peristiwa 16 Agustus 1945*. Jakarta: Kompas.
- Sukarman HD, U. Warliyah, Ii Wahyudin. 2006. *Sejarah Perjuangan Suroto Kunto bersama Rakyat Karawang*. Karawang: Dinas Penerangan Pariwisata dan Budaya Kabupaten Karawang.
- Warliyah, Uwar, Ii Wahyudin, Udju Sudjono, Sudirman, Fadly. 2003. *Sejarah Perjuangan Masyarakat Karawang dan Sekitarnya 1945-1950*. Karawang: Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

3. Internet

- “Konflik Pelik Tentara Republik vs laskar-di Pinggir Jakarta”, dalam <https://news.okezone.com/read/2017/03/03/338/1633102/news-story>, diakses 5 Januari 2018 Pukul 10: 23 WIB.
- “Laskar-rakyat-dalam-sejarah-perang-nasional”, dalam <https://cenya95.wordpress.com/2009/07/07/>, diakses 3 Januari 2018 Pukul 15: 08 WIB.
- “Mayor Surotokunto”, diakses dari <http://sundakarawang.blogspot.com/2009/10/mayor-surotokunto.html>, diakses 11 Desember 2017, pukul 9.41WIB.
- “Sejarah Singkat Kota Karawang”, dalam <http://www.potretkarawang.com>, diakses 11 Januari 2018 Pukul 10: 01 WIB.